

## Sekularisasi Internal dan Konflik Kekuasaan di Gereja HKBP (1992-1998) = Internal Secularization and Power Competition: A Sociological Study of The HKBP Church (1992-1998)

Hutapea, May Sandy Parningotan, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20496023&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

Studi ini berupaya menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi dan mengkonstruksi proses konflik (1992-1998) maupun sekularisasi internal, serta relasi diantara keduanya di gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP). Kerangka konseptual Penelitian ini merujuk pemikiran M. Chaves tentang <em>internal secularization</em> untuk menganalisis dan mencermati dinamika relasi antara para rohaniawan/ti (<em>religious authority</em>) dengan jemaat awam (<em>agency structure</em>) dalam konflik dan sekularisasi internal internal HKBP. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan strategi <em>case study</em>. Informasi hasil wawancara mendalam yang dilakukan terhadap informan terpilih merupakan data primer sedangkan dokumen-dokumen serta literatur lainnya sebagai sumber data sekunder. Hasil penelitian ini menemukan bahwa penafsiran rohaniawan/ti (<em>religious authority</em>) maupun jemaat awam (<em>agency structure</em>) atas otoritas gereja (<em>Sahala ni Huria</em>) memiliki resonansi dengan konsep tradisional Batak Toba (Domain Riil). Gaya kepemimpinan otokratik, rekonsiliasi semu dari konflik-konflik sebelumnya, campur tangan eksternal dan ambisi personal/kelompok atas <em>resources</em> (kehormatan, Pengakuan, Jabatan, fasilitas, kekayaan serta <em>symbolic capital</em> lainnya) menyebabkan terjadinya peristiwa konflik kekuasaan (Domain Aktual). Aturan/Peraturan yang dibuat, mendukung persaingan bebas (Darwinisme Sosial: gereja menjadi lebih sekuler) dan mendorong friksi antar kelompok (Domain Empiris). Pada domain ini juga terdapat peran dan pengaruh jemaat awam dalam pembuatan peraturan yang meng-katalisasi potensi friksi antar kelompok. Penelitian ini menemukan bahwa sekularisasi internal HKBP menyebabkan konflik dan pada gilirannya konflik menyebabkan HKBP semakin tersekularisasi.

.....This study aims to shed light analyses on the underlying factors and to construct the process of conflicts and internal secularization of the Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) church in the period of 1992-1998. The study employs the concept of internal secularization from M. Chaves as its conceptual framework. The study also uses Roy Bhaskars critical realism as its analytical tool to look at the dynamic relationship between religious authority structure and agency structure that shaped the conflicts and internal secularization. The approach used in this study is a qualitative case study research. The research discovers that in Domain of the Real, there are interpretation of the concept of Religious Authority (Batak: <em>Sahala ni Huria</em>) both of clergy (religious authority structure ) and lay church (agency structure) that resonates closely with the Batak magical concept. In Domain of the Actual, there are conflicts of power caused by a multiple of factors, namely autocratic leadership style, false reconciliation of previous conflicts, external intervention and personal ambitions on resources (glory, honor, recognition, position, gold and other symbolic capital). In Domain of the empirical, there are drafting legislation that supports free competition (Social Darwinism: The church become more secular) and creating friction among groups. In this domain are also found the role of lay church that affect drafting legislation and even catalyze friction among groups. The study finds out that internal secularization causes conflict, and conflicts in turn lead to a

more internal secularization. The research suggests the need for corrections on the interpretation of religious authority to avoid its resonance with the Batak magical concept. the lack of compliance with the rules and regulations of its bureaucratic organization demand for reform (recruitment, regeneration of leader, succession mechanism, and sanction for violations).